

## WEEKLY REPORT

### MARKET DRIVERS

#### DOMESTIK

- Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2022 kembali mencatat surplus, yakni USD4,23 miliar, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada bulan sebelumnya sebesar USD5,15 miliar (15 Agustus 2022). Kinerja positif tersebut melanjutkan surplus neraca perdagangan Indonesia sejak Mei 2020. Neraca perdagangan Indonesia pada Januari-Juli 2022 secara keseluruhan mencatat surplus USD29,17 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2021 sebesar USD15,95 miliar. Surplus neraca perdagangan Juli 2022 bersumber dari surplus neraca perdagangan nonmigas di tengah peningkatan defisit neraca perdagangan migas. Pada Juli 2022, surplus neraca perdagangan nonmigas tercatat USD7,31 miliar, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan surplus pada bulan sebelumnya sebesar USD7,27 miliar. Perkembangan tersebut ditopang oleh kinerja ekspor nonmigas sebesar USD24,20 miliar pada Juli 2022, meski sedikit menurun dibandingkan dengan USD24,60 miliar pada bulan sebelumnya. Tetap kuatnya kinerja ekspor nonmigas terutama bersumber dari ekspor komoditas berbasis sumber daya alam, seperti bahan bakar mineral termasuk batu bara, CPO, serta produk manufaktur, seperti pulp dari kayu yang tercatat meningkat, didukung oleh harga komoditas global yang masih tinggi. Adapun impor nonmigas masih tetap kuat pada seluruh komponen, sejalan dengan terus berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik. Sementara itu, defisit neraca perdagangan migas tercatat meningkat dari USD2,12 miliar pada Juni 2022 menjadi USD3,08 miliar pada Juli 2022, sejalan dengan kenaikan impor migas di tengah penurunan ekspor migas.
- Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan II 2022 tercatat sebesar USD403,0 miliar, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada triwulan sebelumnya sebesar USD412,6 miliar (15 Agustus 2022). Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) dan sektor swasta. Secara tahunan, posisi ULN triwulan II 2022 mengalami kontraksi sebesar 3,4% yoy, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 0,9% yoy. Posisi ULN Pemerintah pada triwulan II 2022 sebesar USD187,3 miliar, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada triwulan sebelumnya sebesar USD196,2 miliar. Penurunan posisi ULN Pemerintah antara lain karena adanya pelunasan pinjaman bilateral, komersial, dan multilateral yang jatuh tempo selama periode April hingga Juni 2022. Pelunasan Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang jatuh tempo juga turut mendukung penurunan ULN Pemerintah di triwulan laporan. Di samping itu, volatilitas di pasar keuangan global yang cenderung tinggi juga berpengaruh pada perpindahan investasi SBN domestik ke instrumen lain, sehingga mengurangi porsi kepemilikan investor nonresiden pada SBN domestik. Posisi ULN swasta pada triwulan II 2022 tercatat sebesar USD207,1 miliar, sedikit turun dari USD207,4 miliar pada triwulan I 2022. ULN Indonesia pada triwulan II 2022 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 31,8%, menurun dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 33,8%. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 86,7% dari total ULN.
- Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) triwulan II 2022 tercatat sebesar 1,72% yoy, relatif melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 1,77% yoy (16 Agustus 2022). Pada triwulan III 2022, pertumbuhan harga properti residensial primer diperkirakan kembali meningkat terbatas sebesar 1,53% yoy. Dari sisi penjualan, hasil survei triwulan II 2022 mengindikasikan penjualan properti residensial di pasar primer tumbuh meningkat. Hal ini tercermin dari penjualan properti residensial yang tumbuh positif sebesar 15,23% yoy pada triwulan II 2022, setelah berkontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 10,11% yoy. Hasil survei juga menunjukkan bahwa pembiayaan nonperbankan

#### Disclaimer

Data diambil dari sumber terpercaya. Laporan harian disusun untuk kepentingan internal. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan/atauafiliasinya, termasuk karyawan tidak bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan data dari sumber data yang digunakan. Opini dalam Analisa merupakan pendapat pribadi analis dan tidak mewakili perusahaan.

masih menjadi sumber pembiayaan utama untuk pembangunan properti residensial. Pada triwulan II 2022, sebesar 64,82% dari total kebutuhan modal pembangunan proyek perumahan berasal dari dana internal. Sementara itu dari sisi konsumen, pembiayaan perbankan dengan fasilitas KPR masih menjadi pilihan utama dalam pembelian properti residensial dengan pangsa sebesar 74,97% dari total pembiayaan.

▪ **Pemerintah mengajukan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 dan Nota Keuangan kepada DPR RI dengan tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan (16 Agustus 2022).** Pendapatan negara pada RAPBN tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp2.443,6 triliun, yang terdiri dari : (a) Penerimaan perpajakan sebesar Rp2.016,9 triliun, dengan kebijakan yang diarahkan untuk optimalisasi pendapatan yang mendukung transformasi ekonomi dan upaya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 dengan memastikan implementasi reformasi perpajakan berjalan dengan efektif dalam rangka penguatan konsolidasi fiskal; (b) PNBP sebesar Rp426,3 triliun, dengan kebijakan antara lain berupa optimalisasi pemanfaatan SDA melalui penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan pemanfaatan SDA, dan peningkatan nilai tambah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, serta optimalisasi dividen BUMN dengan mempertimbangkan faktor profitabilitas, kebutuhan pendanaan perusahaan, persepsi investor, regulasi dan covenant, serta dengan mendorong perbaikan kinerja serta efisiensi; dan (c) Penerimaan hibah sebesar Rp409,4 miliar, yang ditujukan antara lain untuk kegiatan percepatan penurunan stunting, penanganan perubahan iklim (*climate change*), dan program-program pengembangan desa dan sistem perkotaan, penyediaan air bersih, serta pendidikan vokasi pertanian.

▪ **Belanja negara pada RAPBN tahun 2023 diproyeksikan mencapai Rp3.041,7 triliun atau sebesar 14,5% terhadap PDB, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.230,0 triliun atau 73,3% terhadap Belanja Negara dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp811,7 triliun atau 26,7% terhadap Belanja Negara (16 Agustus 2022).** Adapun, kebijakan Belanja Negara untuk tahun 2023 diarahkan untuk: (i) mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial; (ii) Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung transformasi ekonomi (ICT, konektivitas, energi, pangan), termasuk pembangunan IKN; (iii) meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi yang lebih efisien dan berintegritas; (iv) melanjutkan penguatan *spending better* antara lain melalui efisiensi belanja non-prioritas dan mendorong belanja berorientasi hasil (*result-based budgeting*); (v) meningkatkan efektivitas program Perlindungan Sosial termasuk melanjutkan reformasi subsidi dan bantuan sosial yang efektif dan lebih tepat sasaran; (vi) memperkuat fleksibilitas belanja untukantisipasi ketidakpastian; (vii) meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah terutama untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik; dan (viii) meningkatkan kualitas pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan untuk percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

▪ **Sedangkan pembiayaan anggaran tahun 2023 direncanakan sebesar Rp598,2 triliun atau sebesar 2,85% dari PDB (16 Agustus 2022).** Penentuan target defisit tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan sekaligus menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dimana defisit APBN harus sudah kembali maksimal 3% terhadap PDB pada tahun 2023. Melalui kebijakan fiskal tahun 2023, Pemerintah akan menggunakan seluruh sumber daya untuk mengakselerasi agenda reformasi struktural pascapandemi dan penguatan sisi *supply* untuk meningkatkan produktivitas. Langkah konsolidasi fiskal jangka menengah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2020 dengan fondasi reformasi fiskal yang fokus kepada optimalisasi pendapatan negara, perbaikan kualitas belanja, serta pembiayaan produktif dan inovatif. APBN yang sehat menjadi modal yang kokoh untuk terus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan perbaikan ekonomi ke depan.

**Winang Budoyo**  
Chief Economist

**Widya Pratomo**  
Junior Economist

**Investor Relations & Research Division**  
PT Bank Tabungan Negara  
(Persero), Tbk

Menara BTN Lt. 16  
Jl. Gajah Mada No. 1,  
Jakarta 10130

#### Disclaimer

Data diambil dari sumber terpercaya. Laporan harian disusun untuk kepentingan internal. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan/atauafiliasinya, termasuk karyawan tidak bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan data dari sumber data yang digunakan. Opini dalam Analisa merupakan pendapat pribadi analis dan tidak mewakili perusahaan.

- **Pada RAPBN 2023, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan Pemerintah antara lain, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 5,3% yoy (16 Agustus 2022).** Sebelumnya, pemerintah menetapkan kisaran untuk pertumbuhan ekonomi, yaitu 5,1% yoy hingga 5,4% yoy. Kemudian inflasi pada tahun 2023 diperkirakan di kisaran 3,3% yoy. Sebelumnya, pemerintah menargetkan inflasi ada di kisaran 4,0% yoy hingga 4,8% yoy. Rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp14.750 per dolar Amerika Serikat (AS). Ini masih berada dalam kisaran rentang yang sebelumnya diajukan pemerintah, yaitu kisaran Rp14.500 per dolar AS hingga Rp14.900 per dolar AS. Dengan kondisi ini juga membawa pemerintah memperkirakan rata-rata suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun untuk bergerak di level 7,85%. Sebelumnya, pemerintah mengajukan ada di rentang 6,85% hingga 8,42%. Pemerintah juga memperkirakan harga minyak mentah Indonesia atau *Indonesian Crude Price (ICP)* untuk berada di kisaran US\$ 90 per barel.
- **Pada triwulan II 2022, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mencatat surplus USD2,4 miliar, setelah mengalami defisit USD1,8 miliar pada triwulan sebelumnya (19 Agustus 2022).** Peningkatan kinerja NPI tersebut didukung oleh surplus transaksi berjalan yang meningkat dan perbaikan defisit transaksi modal dan finansial. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2022 mencapai USD136,4 miliar, setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional. Surplus transaksi berjalan meningkat signifikan pada triwulan II 2022 terutama ditopang oleh kinerja ekspor nonmigas yang semakin baik. Transaksi berjalan mencatat surplus sebesar USD3,9 miliar (1,1% dari PDB), naik signifikan dari capaian surplus pada triwulan sebelumnya sebesar USD0,4 miliar (0,1% dari PDB). Kinerja transaksi berjalan tersebut terutama didukung oleh peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas seiring dengan harga komoditas global yang tetap tinggi. Transaksi modal dan finansial triwulan II 2022 mencatat defisit sebesar USD1,1 miliar (0,3% dari PDB), membaik dibandingkan dengan defisit USD2,1 miliar (0,7% dari PDB) pada triwulan I 2022. Kinerja transaksi modal dan finansial ditopang oleh aliran masuk neto (surplus) investasi langsung sebesar USD3,1 miliar, melanjutkan capaian surplus pada triwulan sebelumnya yang mencerminkan optimisme investor terhadap prospek pemulihan ekonomi dan iklim investasi domestik yang terjaga.

#### MARKET IMPACTS

- **Dari Indikator Pasar Keuangan Indonesia di Tabel 4, dapat kita lihat bahwa terjadi perubahan kondisi dalam satu minggu terakhir:**
  - **IHSG menguat sebesar 0,60% dalam seminggu terakhir** yaitu dari 7.129 ke 7.172. Jika dibandingkan akhir tahun 2021 masih menguat sebesar 8,98% ytd. Surplus neraca perdagangan dan neraca pembayaran yang terus berlanjut turut mempengaruhi kinerja pasar saham pada minggu ini.
  - Dalam satu minggu terakhir, **Rupiah terdepresiasi sebesar 1,16%** dari Rp14.668 ke Rp14.838 per USD. Jika dibandingkan akhir tahun 2021 juga masih terdepresiasi sebesar 4,03% ytd. Depresiasi rupiah selama satu minggu ini disebabkan antara lain yield SBN 10 tahun naik ke level 7,07%, premi CDS Indonesia 5 tahun naik ke level 108,91 serta investor asing mencatat *net inflow* sebesar Rp3,01 triliun.
  - **Yield SBN Rupiah 10 tahun naik 12 bps ke level 7,07% dalam seminggu terakhir. Posisi ini menjadi 71 bps lebih tinggi dibandingkan posisi akhir tahun 2021 yang sebesar 6,36%.** Sementara yield SBN USD 10 tahun naik 11 bps ke posisi 4,09% dalam seminggu terakhir, dan jika dibandingkan akhir tahun 2021 posisinya lebih tinggi 195 bps.

**Winang Budoyo**  
Chief Economist

**Widya Pratomo**  
Junior Economist

Investor Relations & Research Division  
PT Bank Tabungan Negara  
(Persero), Tbk

Menara BTN Lt. 16  
Jl. Gajah Mada No. 1,  
Jakarta 10130

#### Disclaimer

Data diambil dari sumber terpercaya.  
Laporan harian disusun untuk kepentingan internal. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan/atau afiliasinya, termasuk karyawan tidak bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan data dari sumber data yang digunakan. Opini dalam Analisa merupakan pendapat pribadi analis dan tidak mewakili perusahaan.

**Tabel 1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2023**

Indikator	Outlook 2022	RAPBN 2023
Pertumbuhan Ekonomi (%yoy)	5,1-5,4	5,3
Inflasi (%yoy)	4,0-4,8	3,3
Nilai Tukar (Rp/USD)	14.500-14.900	14.750
Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	6,85-8,42	7,9
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel)	95-105	90
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	625-630	660
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	956-964	1.050

Sumber : Kemenkeu

**Tabel 2. Postur RAPBN 2023 (Rp triliun)**

Uraian	APBN 2022	Perpres 98/2022	Outlook 2022	RAPBN 2023
<b>A Pendapatan Negara</b>	<b>1846.1</b>	<b>2266.2</b>	<b>2436.9</b>	<b>2443.6</b>
I. Penerimaan Perpajakan	1510.0	1784.0	1924.9	2016.9
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	335.6	481.6	510.9	426.3
<b>B Belanja Negara</b>	<b>2714.2</b>	<b>3106.4</b>	<b>3169.1</b>	<b>3041.7</b>
I. Belanja Pemerintah Pusat	1944.5	2301.6	2370.0	2230.0
II. Transfer ke daerah dan Dana Desa	769.6	804.8	799.1	811.7
<b>C Keseimbangan Primer</b>	<b>(462.2)</b>	<b>(434.4)</b>	<b>(328.4)</b>	<b>(156.8)</b>
<b>D Surplus / (Defisit) Anggaran (A-B)</b>	<b>(868.0)</b>	<b>(840.2)</b>	<b>(732.2)</b>	<b>(598.2)</b>
% Surplus / (Defisit) Anggaran terhadap PDB	<b>(4.85)</b>	<b>(4.50)</b>	<b>(3.92)</b>	<b>(2.85)</b>
<b>E Pembiayaan Anggaran</b>	<b>868.0</b>	<b>840.2</b>	<b>732.2</b>	<b>598.2</b>

Sumber : Kemenkeu

**Tabel 3. Perubahan Beberapa Indikator Pasar**

Perubahan Year-to-Date 19 Agustus 2022								
Nilai Tukar		Saham		Obligasi Pemerintah 10Y			Komoditi	
				Negara	Yield	Yield Change		
RUB	20.69%	JCI	8.98%	China	2.63%	-15	Coal	144.0%
DXY	12.57%	IBOV	8.58%	Japan	0.20%	13	Brent	22.4%
BRL	7.22%	SENSEX	2.15%	Thailand	2.41%	51	WTI	18.4%
IDR	-4.03%	NKY	0.48%	Indonesia	7.07%	71	Rice	9.3%
CNY	-7.10%	SET	-1.78%	India	7.28%	82	Nickel	4.6%
THB	-7.38%	FBMKLCI	-4.02%	Brazil	12.15%	131	Gold	-2.2%
MYR	-7.45%	SPX	-10.12%	Germany	1.18%	136	Wheat	-4.7%
PHP	-9.71%	SHCOMP	-10.49%	USA	2.92%	141	Rubber	-17.0%
EUR	-11.34%	MXAPJ	-16.35%	Italy	3.42%	225	CPO	-19.2%
JPY	-18.62%	CCMP	-17.13%	Russia	15.99%	754	Natural Gas	-77.8%

Sumber : Bloomberg

**Tabel 4. Indikator Pasar Keuangan Indonesia Dalam Seminggu Terakhir**

	19-Aug-22	12-Aug-22	Jul 22	Dec 21	12 Agt - 19 Agt (wow)	Jul - 19 Agt (mtd)	Dec 21 - 19 Agt (ytd)
IHSG	7 172	7 129	6 951	6 581	0.60%	3.18%	8.98%
Rupiah	14 838	14 668	14 848	14 263	-1.16%	0.07%	-4.03%
10Y Rupiah Bond Yield	7.07	6.95	7.14	6.36	12 bps	-7 bps	71 bps
10Y USD Bond Yield	4.09	3.76	3.93	2.14	33 bps	16 bps	195 bps
CDS Indo 5Y	108.91	97.87	104.19	73.29	11 bps	4 bps	35 bps

Sumber : Bloomberg

**Winang Budoyo**

Chief Economist

**Widya Pratomo**

Junior Economist

**Investor Relations & Research Division**

PT Bank Tabungan Negara  
(Persero), Tbk

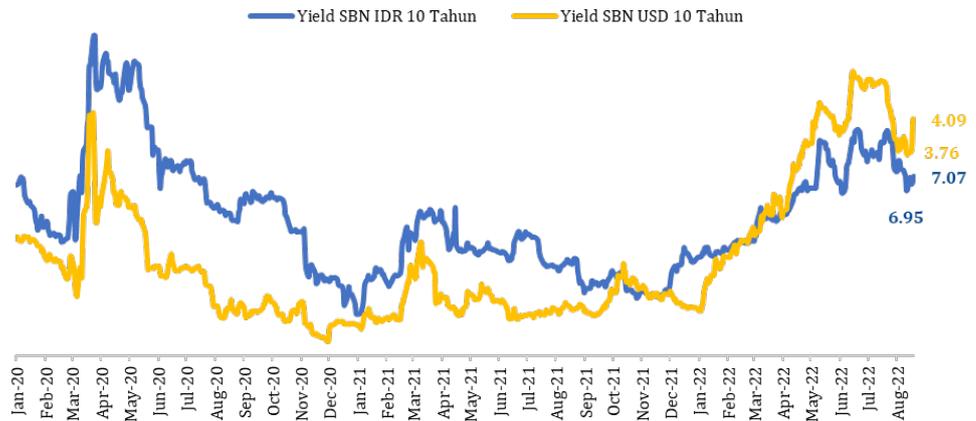
Menara BTN Lt. 16

Jl. Gajah Mada No. 1,  
Jakarta 10130

**Disclaimer**

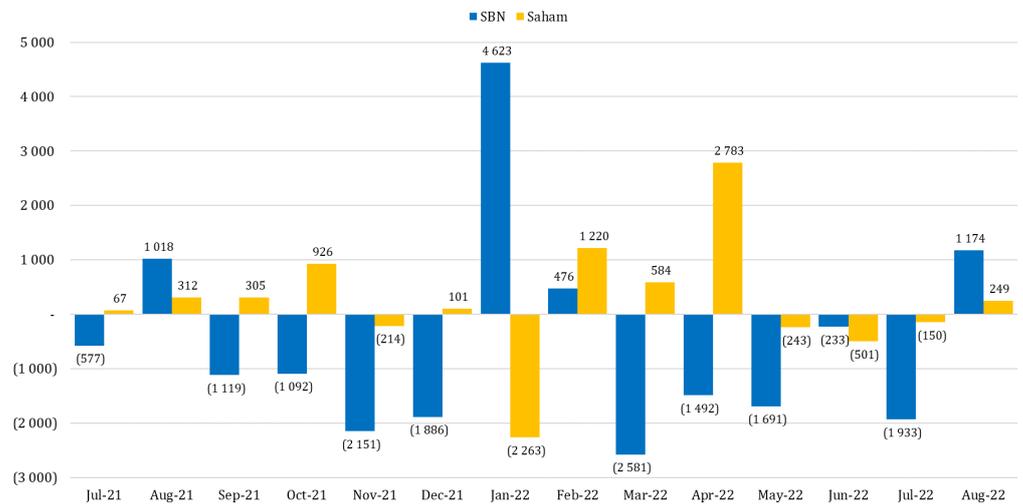
Data diambil dari sumber terpercaya. Laporan harian disusun untuk kepentingan internal. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan/atauafiliasinya, termasuk karyawan tidak bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan data dari sumber data yang digunakan. Opini dalam Analisa merupakan pendapat pribadi analis dan tidak mewakili perusahaan.

**Grafik 1. Perkembangan Yield SBN Rupiah dan Valas 10 Tahun (%)**



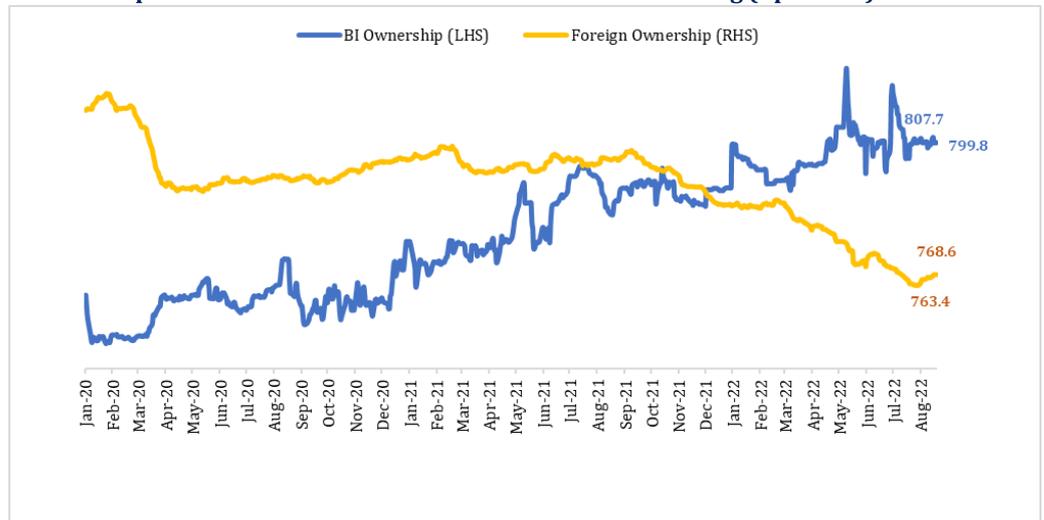
Sumber : Bloomberg

**Grafik 2. Net Buy/Sell Investor Asing di SBN dan Saham (USD juta) s.d 19 Agustus 2022**



Sumber : Bloomberg

**Grafik 3. Kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia dan Investor Asing (Rp triliun)**



Sumber : Bloomberg

**Winang Budoyo**  
Chief Economist

**Widya Pratomo**  
Junior Economist

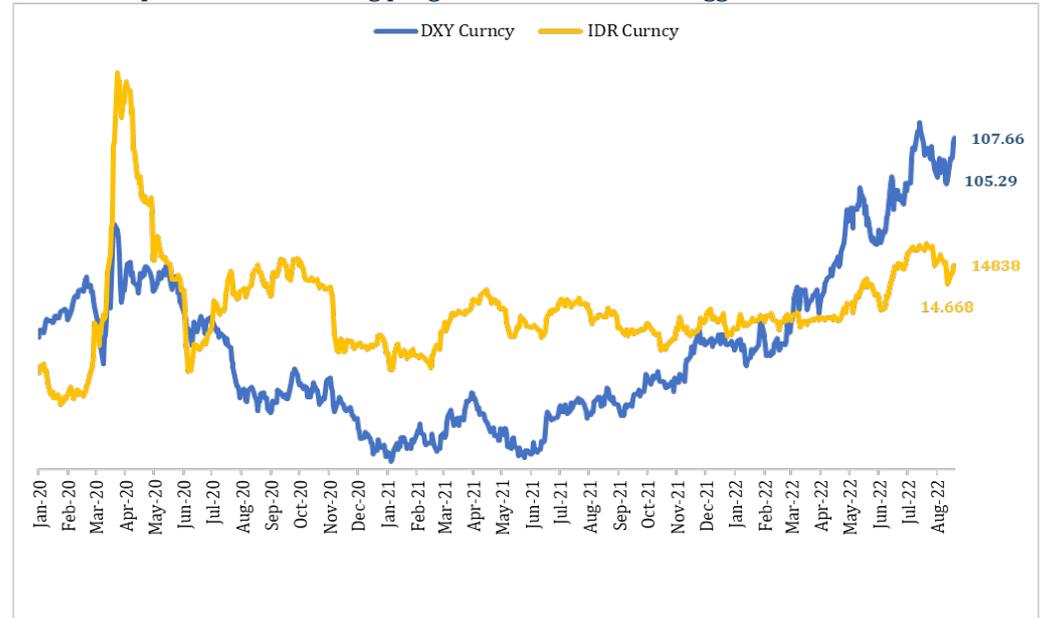
Investor Relations & Research Division  
PT Bank Tabungan Negara  
(Persero), Tbk

Menara BTN Lt. 16  
Jl. Gajah Mada No. 1,  
Jakarta 10130

**Disclaimer**

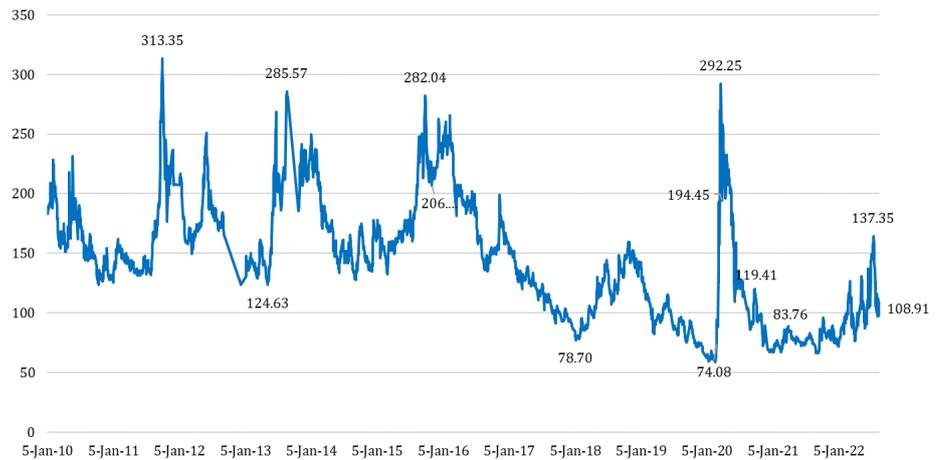
Data diambil dari sumber terpercaya. Laporan harian disusun untuk kepentingan internal. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan/atauafiliasinya, termasuk karyawan tidak bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan data dari sumber data yang digunakan. Opini dalam Analisa merupakan pendapat pribadi analis dan tidak mewakili perusahaan.

**Grafik 4. Rupiah melemah seiring penguatan DXY dalam seminggu terakhir**



Sumber : Bloomberg

**Grafik 5. Perkembangan Premi CDS Indonesia 5 Tahun**



Sumber : Bloomberg

**Winang Budoyo**  
Chief Economist

**Widya Pratomo**  
Junior Economist

**Investor Relations & Research Division**  
PT Bank Tabungan Negara  
(Persero), Tbk

Menara BTN Lt. 16  
Jl. Gajah Mada No. 1,  
Jakarta 10130

**Disclaimer**

Data diambil dari sumber terpercaya. Laporan harian disusun untuk kepentingan internal. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan/atau afiliasinya, termasuk karyawan tidak bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan data dari sumber data yang digunakan. Opini dalam Analisa merupakan pendapat pribadi analis dan tidak mewakili perusahaan.